

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi konsep pemberdayaan masyarakat, program pengelolaan sampah dan peningkatan pendapatan di Desa Sindangsari Kelurahan Panyingkiran.

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Suharto 2005, hlm. 57), secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karena itu ide utama pemberdayaan hampir sama dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang penguasa inginkan, dengan tidak mempedulikan keinginan dan minat mereka. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat bergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Maksudnya jika kekuasaan tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak mungkin dapat terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Yaitu bahwa kekuasaan dapat diperluas atau tidak diam ditempat. Menurut (Hasan & Azis, 2019 hlm. 172) Pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat. Yaitu masyarakat didampingi atau difasilitasi dalam mengambil sebuah keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya. Jadi pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan motivasi dan keinginan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri agar bisa lebih berdaya. Dalam pelaksanaannya masyarakat akan didampingi dan difasilitasi oleh pihak yang mengadakan pemberdayaan agar masyarakat dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan. Masyarakat juga diharapkan dapat berinisiatif sendiri dalam melakukan kegiatan agar kemampuan dan

pengetahuannya bertambah. Masyarakat adalah subyek pembangunan dan pihak luar sebagai fasilitator. Maksudnya masyarakat adalah pihak yang melakukan pemberdayaan untuk pembangunan.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan (Suharto 2005, hlm. 58-59):

- a. Pemberdayaan dilakukan untuk menambah pengetahuan orang-orang yang dianggap masih belum berdaya. Sehingga secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan mereka dapat meningkat. Dengan demikian masyarakat yang lemah atau kurang beruntung dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik (Ife, 1995).
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar orang menjadi bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupannya dan menjadi lebih baik. Dengan adanya pemberdayaan orang yang tadinya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri menjadi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi apabila orang-orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Pemberdayaan menekankan bahwa setiap orang dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan kehidupan orang terdekatnya ataupun yang ada di sekitarnya. Contoh memperoleh keterampilan yaitu orang yang tadinya tidak mempunyai keahlian apapun setelah mengikuti pemberdayaan maka orang tersebut jadi mempunyai keahlian seperti menjahit pakaian karena telah mengikuti program pelatihan menjahit. Dengan keahlian yang dimiliki tentunya orang tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kehidupan orang terdekatnya. (Parsons, et.al., 1994).

Menurut Sumodiningrat (dalam Ambar Teguh 2004, hlm. 78-79) menyampaikan bahwa pemberdayaan merupakan istilah yang khas di Indonesia daripada Barat. Di Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. Menurut pendapat Sumodiningrat istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau memberi energi. Maka dari itu pemberdayaan adalah

pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkuat kelompok lemah atau belum berdaya termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan dengan mengikutsertakan kelompok atau individu lemah dalam kegiatan pemberdayaan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut dengan maksimal. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada hasil yang ingin dicapai setelah adanya pemberdayaan tersebut yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Masyarakat diharapkan dapat bertambah pengetahuannya sehingga memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan yang dijalani. Dengan demikian kebutuhan mereka akan terpenuhi seperti terpenuhinya kebutuhan ekonomi.

Menurut (Maryani & Nainggolan 2019, hlm. 8), pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Jika pemberdayaan hanya dilakukan oleh fasilitator tanpa ada partisipasi yang baik dari masyarakat maka pemberdayaan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, dan memperbaiki kondisi situasi sendiri. Dengan kata lain keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2.1.1.1 Indikator Pemberdayaan

Parsons et.al. (dalam Suharto 2005, hlm. 63) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi pemberdayaan yaitu :

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Jika

ada satu individu yang bersungguh-sungguh ingin melakukan perubahan ke arah lebih baik maka setelahnya akan uncul lagi individu lain yang ingin melakukan hal yang sama. Keberhasilan sebuah pemberdayaan berawal dari satu individu yang kemudian menyebar ke individu atau kelompok lain sehingga terjadilah sebuah perubahan yang lebih besar.

- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri orang lain. Rasa percaya diri seseorang dapat terbentuk apabila orang tersebut merasa mampu atau menguasai hal yang sedang atau akan mereka lakukan. Dengan kemampuan yang dimiliki seseorang akan merasa percaya diri karena mengetahui dan memahami apa yang dilakukan.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. Gerakan sosial yang dimaksud adalah pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka mampu memperoleh kekuasaan atau kemampuan untuk dirinya sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2.1.1.2 Strategi Pemberdayaan

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, yaitu mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem di luar dirinya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aspek pemberdayaan: mikro, mezzo, dan makro (Utami, 2019, hlm. 97-98).

- a. Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Atau dengan kata lain pemberdayaan dilakukan dalam skala kecil yaitu hanya dengan berfokus pada satu individu saja yang bertujuan untuk mendorong klien agar dapat menjalankan kehidupannya secara mandiri. Model ini sering disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas.

- b. Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan kepada kelompok sebagai sasaran yang akan diberdayakan. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Makro. Pendekatan ini juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan kepada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.1.1.3 Prinsip Pemberdayaan

Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto 2005, hlm. 68).

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam peksanaannya harus dilakukan dengan berkolaborasi. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja melainkan saling berkaitan satu dan lainnya.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang ada. Dalam prosesnya masyarakat dianggap sebagai aktor yang cakap dan mengetahui atau dianggap mampu melakukan tugas yg mereka lakukan sehingga akan lebih mudah dalam menjangkau sumber-sumber dan kesempatan yang ada.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Masyarakat yang diberdayakan harus mempunyai kepercayaan diri bahwa mereka dapat membuat perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat. Dengan

pengalaman akan membuat kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat semakin kuat. Masyarakat juga akan merasa percaya diri bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka kerjakan.

- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri; tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. Pemberdayaan pada dasarnya dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, dengan kata lain masyarakat harus ikut dalam merumuskan kegiatan pemberdayaan dari awal sampai akhir kegiatan.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

2.1.1.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dengan maksimal untuk bertahan dan menjadi mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya. Sebagai tujuan yaitu masyarakat menjadi meningkat kualitas kehidupannya.

Menurut Mardikanto (dalam Maryani & Nainggolan, 2019 hlm. 8-11) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan, "*better institution*"

Dengan perbaikan kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Lembaga yang baik mempunyai visi misi tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memperbaiki dan memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan maupun pengalaman dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

b. Perbaikan usaha, "*better business*"

Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

c. Perbaikan pendapatan, "*better income*"

Perbaikan bisnis akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan lingkungan, "*better environment*"

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini menunjukkan keadaan ekonomi yang rendah dan kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi. Padahal jika kualitas manusia tinggi yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik sehingga pada akhirnya manusia tidak akan merusak lingkungan.

e. Perbaiki kehidupan. "*better living*"

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang baik pula. Keadaan pendapatan yang stabil dan lingkungan yang layak untuk ditempati diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat menjadi lebih baik.

f. Perbaiki masyarakat "*better community*"

Kehidupan yang baik juga dapat mempengaruhi lingkungan atau kelompok yang berkumpul bersama mereka. Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan yang lebih baik sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.1.1.5 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Maryani & Nainggolan 2019 hlm. 11-12), dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan tersebut. Masing-masing individu saling mengakui dan memahami kelebihan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Dengan adanya kesadaran tersebut maka akan lebih mudah untuk melakukan pemberdayaan karena setiap individu sudah dapat memahami dirinya sendiri.

b. Prinsip partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi atau mendorong kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan harus mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu melaksanakan kegiatan dengan baik dan pada akhirnya menjadi berdaya. Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi 2007, hlm. 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Tumbuhnya partisipasi masyarakat tidak lepas dari faktor karakter sosial masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat dikenal ada karakter sosial ekonomi dan karakter sosial budaya. Karakter sosial budaya masyarakat biasanya ditunjukkan dari tingkat pendidikan sedangkan karakter sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari karakter sosial ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: stratifikasi ekonomi atas, stratifikasi ekonomi menengah, dan stratifikasi ekonomi bawah (Puspitawati & Rahdriawan, 2012).

c. Prinsip keswadayaan

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat tanpa memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan melainkan sebagai objek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya. Jika akan memberikan bantuan maka jangan yang pada akhirnya melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Prinsip berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan. Jika masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri maka secara bertahap program itu akan memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan

keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Sehingga pada akhirnya mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk untuk kehidupan yang lebih layak.

2.1.1.6 Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan. Menurut Soekanto dalam (D. Maryani, R. Nainggolan 2019 hlm, 13-14):

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama penyiapan tugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah penyiapan lapangan. Penyiapan lapangan penting dilakukan untuk memudahkan pada saat pelaksanaan kegiatan.

b. Tahap pengkajian

Tahap ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat titik dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klient. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana tahap persiapan tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Pengkajian adalah kegiatan mengumpulkan data untuk mengetahui berbagai permasalahan yang timbul di dalam masyarakat (Aziz, 2012).

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Menurut Marvin dalam (Rahmat 2018, hlm. 90) mendefinisikan perencanaan dengan menekankan pada upaya untuk mempersiapkan kemampuan sekarang menuju kondisi yang akan datang dengan mempertimbangkan lingkungan. Terdapat beberapa prinsip perencanaan yaitu : Pertama, pendekatan pada perencanaan harus bersifat fleksibel serta selalu dilakukan tinjauan ulang. Ini

dimaksudkan agar setiap perencanaan yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan organisasi baik bersifat internal ataupun eksternal. Kedua: Semua civitas akademika harus berpartisipasi pada hal-hal tertentu pada proses perencanaan. Anggota organisasi diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan agar dapat memahami secara baik dan tepat apa yang menjadi tujuan organisasi. Karena dengan cara demikian bahwa semua unsur yang ada pada organisasi sebagai bagian dari sistem manajemen. Ketiga: Setiap aktivitas perencanaan harus saling terkait pada masing-masing unsur dalam sistem organisasi tersebut. Suatu keterkaitan antara unsur terutama sekali diarahkan oleh kesamaan misi dan tujuan yang telah ditetapkan pada level faktor akademik, pendanaan, sosial dan fisik. Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Trisnawati & Agustana, 2018)

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan titik beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

d. Tahap formalisasi rencana aksi

Tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk memutuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada titik di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

e. Tahap pelaksanaan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program

yang telah dikembangkan dari kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan titik pada tahap ini supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sarannya maka program itu lebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti. Tahap pelaksanaan merupakan tahapan melaksanakan pilihan yang telah disepakati. Sebelum ke tahap ini masih dalam bentuk pemikiran sedangkan pada tahapan pelaksanaan yaitu dilaksanakan secara nyata (Oktavia et al., 2021).

Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Sebagai sebuah tindakan praktis, penyuluhan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penyuluhan tidak lain adalah hidup dan kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat. (Amanah, 2007).
- 2) Menurut Rivai (2006 hlm. 226) Pelatihan merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar seseorang dapat semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Pelatihan biasanya berfokus pada penyediaan keterampilan-keterampilan agar meningkatkan kemampuan.
- 3) Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.

f. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan

melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih Mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

Menurut (Rahmat 2018, hlm. 175) Evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya melalui rangkain informasi yang diperoleh evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Namun yang mengambil keputusan itu sendiri bukanlah seorang evaluator melainkan pihak lain yang lebih beRWenang dalam mengambil keputusan tersebut.

g. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

2.1.1.7 Cara Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan bukan hanya dalam peningkatan pada bidang perekonomian saja, tetapi juga diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti usaha untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah serta masyarakat dalam bentuk pelatihan. Kartasmita (1996, hlm. 159) mengemukakan bahwa memberdayakan masyarakat harus dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia,

setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat berkembang. Artinya, setiap manusia pasti akan berkembang tergantung dari kemauan manusia itu sendiri. Pemberdayaan dilakukan untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya dan juga membangkitkan motivasi dan kesadaran masyarakat agar mau meningkatkan kehidupannya ke arah yang lebih baik.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain itu untuk menciptakan iklim dan suasana. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai masukan (*input*) serta akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
- c. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Karena hal ini justru akan menghambat perkembangan pengetahuan masyarakat kecil. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian.

Adapun hambatan pemberdayaan masyarakat menurut (Fahrudin 2009, hlm. 18) tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan dan masyarakat yang mau untuk berpartisipasi didalamnya sehingga akan terjadi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

2.1.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan erat kaitannya dengan konsep manajemen. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 4 arti, pertama yaitu proses, cara, perbuatan mengelola, kedua yaitu proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan orang lain, ketiga yaitu proses untuk membantu merumuskan

kebijakan dan tujuan organisasi dan keempat yaitu proses pengawasan pada semua hal yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Hendro dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang berintikan dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam sebuah pengelolaan harus ada perencanaan yang matang kemudian di organisasikan. Setelah hal tersebut dilaksanakan maka harus ada penggerak agar suatu kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir harus dilakukan pengawasan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dari segi lingkungan, sampah dapat membuat pencemaran pada lingkungan atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat atau tidak sempurna pada saat diproduksi, materi berlebihan, atau bahan yang ditolak (Kahfi, 2017). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing (Siagian, 2002). Pengelolaan sampah bertujuan untuk mencegah timbunan sampah, mengurangi limbah dengan mendorong masyarakat agar sampah tidak dibuang tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu.

Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah adalah tiga prinsip yang sering digaungkan dalam mengelola sampah. Prinsip ini biasa disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Prinsip ini sangat populer karena sangat mudah diikuti oleh berbagai kalangan. Sebab, hanya dengan mengurangi sampah, menggunakan kembali barang-barang yang tidak terpakai, dan mendaur ulang sampah yang mudah di daur ulang, kita dapat meningkatkan kualitas hidup di rumah dengan berkurangnya hasil buangan kita ke lingkungan. Setiap urutan ini memiliki prioritas yang berbeda. *Reduce* atau pengurangan sampah adalah prioritas utama dalam pengelolaan sampah. Disusul oleh *reuse* atau penggunaan kembali sampah, lalu *recycle* atau pendaurulangan sampah. Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu penerapannya adalah melalui pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang diarahkan kepada daur ulang sampah (Ihsan, 2021).

2.2.2 Tahap Pegelolaan Sampah

Sesuai dengan yang telah diatur oleh Permen LH RI Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang selanjutnya dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

a. Pemilahan pertama

Masyarakat memilah dan mengumpulkan sampah dirumah. Sampah dapat dipilah menjadi tiga bagian yaitu sampah organik, anorganik dan residu. Pemilahan ini dapat dilakukan dengan cara menyiapkan tempat sampah yang berbeda untuk setiap jenisnya. Sampah anorganik yang nantinya akan disetorkan dipisahkan pada tempat sampah yang berbeda, kemudian sampah anorganik juga yang akan dimanfaatkan kemabli seperti untuk kompos dan pakan ternak.

b. Penyetoran

Setelah sampah dikumpulkan, masyarakat melakukan penyetoran sampah yang telah dipilah ke tempat pengelolaan sampah. Sampah anorganik disetorkan ke bank sampah dan nantinya akan diterima oleh pengurus.

c. Penimbangan

Setelah itu berikan sampah yang sudah terpilah ke petugas penimbang. Penimbangan dilakukan agar jelas berapa jumlah sampah yang disetorkan.

Penimbangan akan dilakukan oleh petugas penimbangan yang disaksikan langsung oleh penyeter.

d. Pencatatan

Pencatatan akan dilakukan sesuai dengan jumlah atau banyaknya sampah yang disetorkan. Setiap hasil penimbangan akan dicatat pada buku catatan penimbangan. Hal yang dicatat meliputi: 1) Tanggal penimbangan, yaitu tanggal pada saat penyeteroran sampah dilakukan, 2) Nama barang, yaitu jenis sampah yang disetorkan dituliskan agar lebih mudah dalam menentukan harga, 3) Harga, yaitu menuliskan harga sesuai dengan sampah apa yang disetorkan, 4) Berat/pcs, yaitu kuantitas sampah yang disetorkan, 5) Total Penabungan, yaitu total yang ditabungkan pada hari itu, 6) Saldo akhir, yaitu saldo secara keseluruhan termasuk dengan yang baru saja ditabungkan.

e. Pemilahan kedua

Kemudian petugas akan mengecek kembali sampah terpilah yang sudah disetorkan. Pemilahan kedua yang dilakukan yaitu bertujuan untuk menyesuaikan jenis sampah yang ada dengan pengepul atau tempat penjualan akhir sampah agar mendapatkan nilai jual yang lebih baik.

f. Penjualan

Penjualan dilakukan satu bulan sekali. Sampah yang sudah terkumpul biasanya dijual ke pengepul sampah atau dijual kepada yang sudah bekerja sama dengan pihak terkait.

2.2.3 Pengertian *Reuse Reduce Recycle*

a. *Reduce*

Menurut (Hartono, 2008 hlm. 30) *Reduce* atau reduksi sampah diterapkan dengan meminimalisir jumlah barang yang digunakan. Seperti mengganti penggunaan tisu menggunakan lap kain yang nantinya dapat dicuci dan dipakai kembali. Pengurangan tidak dilakukan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barang-barang yang mengandung kimia berbahaya. Penanganan sampah bukan hal yang mudah, proses penanganan sampah sangatlah kompleks karena mencakup beberapa aspek, yaitu aspek teknis, aspek ekonomi dan aspek sosiopolitis. Pengelolaan sampah adalah usaha yang dilakukan untuk

mengatur dan mengelola sampah dari proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga samapi pada pembuangan akhir (Suryani, 2014).

Tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *Reduce*:

- 1) Gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Seperti memanfaatkan botol bekas sebagai pot untuk tanaman.
- 2) Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Sampah yang telah dipilah dapat memiliki nilai jual. Atau sampah tersebut dapat diberikan kepada yang memerlukan seperti memberikan dengan sukarela kepada pengepul sampah.
- 3) Ubah pola makan (kurangi makanan kaleng/instan). Dengan mengkonsumsi makanan segar maka sekaligus mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, karena kebanyakan makanan instan menggunakan bahan plastik untuk membungkusnya.
- 4) Bawa kantong/tas belanja sendiri ketika berbelanja.
- 5) Tolak penggunaan kantong plastik. Kita dapat menolak penggunaan kantong plastik ketika berbelanja atau membeli makanan. Dan membawa wadah sendiri untuk menggantikan plastik atau wadah yang berpotensi menjadi sampah nantinya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengganggu keindahan lingkungan, menimbulkan bau dan membuat berkembangnya penyakit. Pencemaran pada lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, yaitu masyarakat yang menghasilkan sampah tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat terjadi jika masyarakat tidak menyediakan tempat sampah di rumah dan membuang sampah sembarangan sehingga pada akhirnya mencemari lingkungan sekitarnya (Saputro et al., 2015).

b. *Reuse*

Menurut (Hartono, 2008 hlm. 30) *Reuse* berarti memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung. Sampah diusahakan dapat dipakai berulang-ulang. Tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program *Reuse*:

- 1) Pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang. Contoh produk yang dapat didaur ulang adalah plastik dan kertas.
- 2) Gunakan produk yang dapat diisi ulang (*refill*). Pada zaman sekarang banyak sekali produk yang menawarkan isi ulang untuk menggunakan kembali produk tersebut. Seperti detergen pencuci pakaian yang bisa diisi ulang.
- 3) Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Bahan sekali pakai adalah bahan yang tidak dapat digunakan kembali seperti bahan-bahan yang terbuat dari plastik.
- 4) Plastik kresek digunakan untuk tempat sampah
- 5) Kaleng/baskom besar digunakan untuk pot bunga atau tempat sampah. Sampah yang berbentuk wadah dapat dimanfaatkan kembali sebagai pot untuk menanam sayuran atau tumbuhan disekitar rumah.
- 6) Gelas atau botol plastik untuk pot bibit, dan macam-macam kerajinan.
- 7) Bekas kemasan plastik tebal isi ulang digunakan sebagai tas.
- 8) Potongan kain/baju bekas untuk lap, keset, dan lain-lain.
- 9) Majalah atau buku untuk perpustakaan.

Penumpukkan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) adalah akibat dari tidak dilakukan pengelolaan sampah sebelumnya. TPA dengan *system* lahan urug saniter yang ramah lingkungan ternyata tidak ramah dalam aspek pembiayaan, karena membutuhkan biaya tinggi untuk investasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah pemerintah daerah sudah harus mengubah pola pikir yang lebih bernuansa lingkungan. Konsep pengelolaan sampah yang terpadu sudah saatnya diterapkan, yaitu dengan meminimisasi sampah serta maksimasi daur ulang dan pengomposan disertai tempat pembuangan akhir (TPA) yang ramah bagi lingkungan (Qamari et al., 2019).

c. *Recycle*

Menurut (Hartono, 2008 hlm. 31) *Recycle* yaitu mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang yang baru. Seperti memanfaatkan kain perca untuk dijadikan kerajinan tas. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun, beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. Pengomposan dan briket merupakan contoh produk hasilnya. Adapaun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daur ulang yaitu peredaran ulang

suatu masa. Dalam arti lain yaitu pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, misalnya kertas yang diolah kembali untuk mendapatkan produk baru. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga dalam mengelola sampah rumah tangganya dalam melakukan daur ulang juga menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Pemilahan sampah rumah tangga yang termasuk kategori sampah organik dapat dijadikan kompos sedangkan sampah rumah tangga anorganik ditabungkan ke bank sampah untuk didaur ulang kembali dan dapat dijadikan bahan yang bernilai ekonomis nantinya (Asteria & Heruman, 2016).

2.1.3 Pendapatan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Dalam arti lain pendapatan adalah hasil yang didapatkan setelah seseorang melakukan kegiatan atau pekerjaan.

Menurut (Nurmanaf 2006 hlm. 272) Kontribusi pendapatan dari satu jenis kegiatan terhadap total pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas pendapatan rumah tangga cenderung dipengaruhi dominasi sumber-sumber pendapatan. Jenis-jenis pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian umumnya tidak terkait dengan musim dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.

Pemberdayaan masyarakat seringkali dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Meningkatnya perekonomian masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan akan berdampak terhadap berbagai hal apabila dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti masyarakat petani yang diberikan keterampilan dalam membuat pupuk kompos untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik.

Menurut Harahap (dalam Habib, 2021) secara konseptual “peningkatan” berasal dari kata “tingkat”, yang berarti “lapis” atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Pendapatan keluarga merupakan jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga (Danial et al., 2018).

Menurut Rosyidi (dalam Habib, 2021) secara asal kata, istilah “ekonomi” itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oikonomia*”. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*”. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Jadi arti asli *oikonomia* adalah mengatur rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa membicarakan ekonomi berarti membicarakan aturan, kaidah, dan cara mengelola suatu rumah tangga manusia. Rumah tangga disini bukanlah dalam arti sempit, melainkan menunjuk pada suatu kelompok sosial, yang dianggap sebagai rumah tangga kelompok sosial ini dapat berwujud perusahaan, desa, kota, bahkan negara.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang ada, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah, diantaranya:

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh N. Neni Triana mahasiswa Program Studi Teknik Industri, Muhamad Sayuti mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Annisa Indah Pratiwi mahasiswa manajemen, Akda Zahrotul Wathoni mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, Mulyana mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tahun 2021 dengan judul Mengolah Sampah Menjadi Rupiah Melalui Progra TPS3R Desa Teluk Jambe Kota Karawang. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan

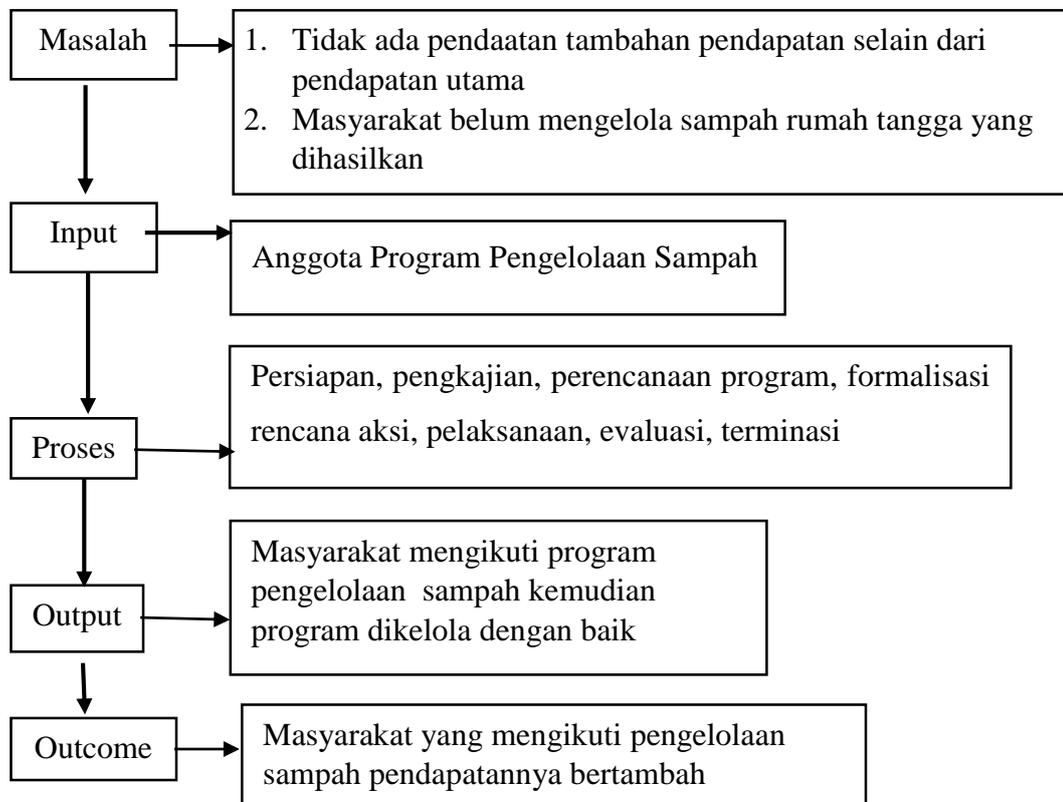
sampah dan permasalahan tersebut bisa diminimalkan dan dikendalikan dengan adanya program TPS3R. TPS3R mampu mengolah sampah dan menghasilkan output berupa kompos yang nantinya bisa dijual dan digunakan oleh masyarakat sendiri untuk bertani atau berkebun. Selain itu dengan adanya program TPS3R dapat menjadikan lingkungan Desa Teluk Jambe jauh lebih bersih dan sehat.

- 2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Anik Irfatur Rohmah, Dewi Salamah, Diana Kolidah dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Al Hikmah Mojokerto pada tahun 2021 dengan judul Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Desa PuRWjati Kecamatan Ngoro Kota Mojokerto. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) di Desa PuRWojati Kecamatan Ngoro Kota Mojokerto, diketahui ada pengaruh yang signifikan diantaranya dalam hal keuangan, pendapatan dan pengeluaran sudah seimbang. Selain itu juga bisa meringankan beban para petugas TPS3R, mereka bisa bekerja secara optimal. Dampak lain yang dirasakan adalah kondisi TPS3R kini semakin membaik, sudah tidak ada lagi tumpukan sampah yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit.
- 2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Habib mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul Analisis Pemberdayaan Sampah Melalui Sistem *Reuse Reduce Recycle* Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Serta Pendapatan Asli Desa Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Trimodadi Kota Lampung Utara). Penelitian ini menjelaskan mengenai semenjak adanya TPS3R Desa Trimodadi Pendapatan masyarakat relatif meningkat walaupun belum signifikan. TPS3R Desa Trimodadi juga sudah PS3R mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta menciptakan keharmonisan antara manusia dan alam tanpa meninggalkan peran pemerintah untuk melaksanakan tugas berserta kewajibannya kepada masyarakat.

- 2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Iftitah, Khiruddin, Junaedi mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang pada tahun 2018 dengan judul Pemanfaatan Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kota Jombang. Penelitian ini membahas mengenai cara pemanfaatan sampah dalam peningkatan pendapatan masyarakat Kota Jombang dengan membentuk unit-unit Bank Sampah dari hulu timbulnya sampah ke pengumpulan hilir.
- 2.2.5 Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indriyani dan Srie Isnawaty Pakaya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2019 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuka Kabupaten Boalemo. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan salah satunya dengan menyiapkan tempat pengelolaan sampah yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka kesadaran masyarakat meningkat dalam penanganan sampah serta meningkatkan nilai ekonomis sampah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Gambar 1.1 kerangka konseptual peneliti menggambarkan kerangka berpikir dari penelitian ini. Masyarakat Kampung Sindangsari Kelurahan Panyingkiran mayoritas bermata pecaharian sebagai buruh harian lepas dan tidak mempunyai pendapatan tambahan lain. Selain itu dalam rangka meningkatkan tingkat kebersihan, kesehatan masyarakat diadakan program pengelolaan sampah. Untuk itu masyarakat Kampung Sindagsari Kelurahan Panyingkiran bekerja sama dengan pemerintah membuat program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Dengan adanya program tersebut maka diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini dapat mengatasi permasalahan yang ada. Jika sampah sudah dikelola dengan baik tentunya akan mempunyai nilai jual. Di bawah ini adalah kerangka konseptual dari peneliti.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

2.4.1 Bagaimana tahap pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah?